

TAJUK RENCANA

Menanti Kabinet Prabowo

INDONESIA negara besar. Mau tidak mau perlu diurus kabinet pemerintahan yang ‘gemuk’, dengan koalisi yang besar. Pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto di BNI Daily Investor JCC Senayan pekan lalu, adalah sinyal. Bahkan mungkin tidak sekadar sinyal. Namun sekaligus menjawab pertanyaan, bila kabinet mendatang akan merupakan kabinet yang gemuk.

Persoalan koalisi yang besar ini tampaknya akan menjadi tantangan pertama bagi Prabowo Subianto. Dan ini bukan persoalan sederhana dan mudah bagi Prabowo. Meski di JCC Senayan, presiden terpilih sudah mengingatkan dirinya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, sehingga perlu koalisi besar. “*Nanti akan dibilang : Kabinet Prabowo kabinet gemuk. Ya negara kita besar Bung.....*”

Hari-hari terakhir menjelang peralihan kekuasaan, perbincangan soal kabinet terus menggelinding. Selain mempersoalkan apakah kabinet yang gemuk, gemoy atau *zaken cabinet*, bocoran mengenai nomenklatur kementerian dan siapa yang akan memegang jabatan, hampir setiap hari beredar di media sosial. Namanya juga bocoran, semua menampilkan versi masing-masing. Tidak ada yang sama antara satu dengan lainnya.

Soal gemuk, kini hampir pasti. Apalagi sebelum pengambilan sumpah DPR periode 2024-2029, DPR RI periode lalu telah mensahkan RUU tentang Kementerian Negara dalam Rapat Paripurna 19 September 2024. Dan salah satu klausul yang diubah adalah kementerian yang dapat dibentuk presiden yang akan datang. Dalam pasal 15 UU No 39/2008 disebutkan, jumlah kementerian yang dapat dibentuk presiden maksimal 34. Namun dalam ketentuan baru, pasal 15 tidak lagi membatasi presiden dalam membentuk kementerian yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan,

Prediksinya akan ada sekitar 40 kementerian. Bahkan sebagaimana dikutip harian ini dari LKBN Antara yang mendapat dokumen yang berisi gambaran nomenklatur mitra AKD. Diprediksi terdapat 44 – 46 ke-

mentrian dalam kabinet tersebut. Kementerian yang ada ingin mengoptimalkan fungsi agar bermanfaat bagi rakyat. Kini, DPR RI juga masih berkoordinasi dengan calon pemerintah yang baru. Tentu untuk menyesuaikan jumlah komisi di DPR RI. (KR,12/10).

Kita memang harus sabar menunggu kabinet Presiden Prabowo. Ada yang menyebut akan diumumkan pascapelantikan presiden, 20 Oktober 2024. Bisa jadi pada hari yang sama, bisa juga keesokan harinya 21 Oktober 2024.

Masih ada waktu seminggu. Dalam dunia politik yang kadang disebut *esuk dhele sore tempe*, banyak hal bisa dilakukan. Bongkar pasang bisa dilakukan Prabowo dalam menyusun kabinet sekarang ini. Karena pembentukan kabinet adalah hak prerogative. Hak istimewa yang dimiliki kepala negara sebagai presiden dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Hak ini diberikan Konstitusi, bersifat mandiri, mutlak dan istimewa. Sekalipun dalam sebuah wawancara televisi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming menyebutkan bila dirinya juga terlibat dan ada masukan dari Presiden Jokowi.

Meski memperhatikan koalisi yang mendukungnya mencapai kursi RI-1, Prabowo juga harus melihat tantangan ke depan. Harapan publik perlu lebih banyak diisi profesional, tidak asal dilontarkan.

Tantangan dalam lompatan pelbagai hal, semakin banyak terjadi. Bukan hanya di dalam negeri namun juga terkait kesinambungan serta keterkaitan kehidupan global. Pemerintah baru harus melakukan sesuatu, menyiapkan Indonesia Maju. Jangka pendek, menyiapkan Indonesia memasuki Indonesia Emas dengan bonus demografi yang harus dikelola dengan baik.

Tidak dapat tidak, suka tidak suka, tantangan tersebut, memerlukan sosok profesional, yang amanah, mampu dan mau bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa dan negara. Silakan menjadi gemuk, lebih dari 40 kementerian. Namun perlu diimbangi memilih dengan tepat *person behind the gun*, sosok yang memiliki *track record* baik di bidangnya. ☐f

Serangan Balasan Iran ke Israel

Muhammad Saifullah

pendekatan terhadap Islam yang lebih lentur. Salah satunya adalah mantan Presiden Iran, Mohammad Khatami, yang mempromosikan pemerintahan demokratis, Islam moderat, dan kebebasan individu. Hanya saja, mereka mengoperasikannya dalam batas ideologi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Keddie, 2006).

Asef Bayat (2013) tampak kurang yakin ketika berbicara Post-Islamisme di Iran karena adanya perbedaan pandangan di atas, khususnya terkait pergerakan anak muda dengan gap kul-



turnya pada satu sisi dan trayek politik serta tradisi keilmuannya yang unik pada sisi lainnya. Alih-alih melihatnya sebagai murni fenomena politik, Bayat memilih istilah *discursive shift* untuk menyebut Post-Islamisme di Iran, yang menurut saya ini merupakan eufemisme dari kondisi yang akan terus menjadi proses.

Moderasi Islam di Iran

Iran memiliki tradisi keberislaman yang distingtif dibanding negara-negara Sunni. Posisinya sebagai negara mayoritas Syiah yang memiliki trayek kesejarahannya sendiri di luar Sunni dan dibentuknya *wilayat al-faqih* yang memiliki kendali penuh terhadap wacana keagamaan dan politik

merupakan faktor mengapa itu bisa terjadi.

Di Iran, yang memiliki otoritas untuk menafsirkan Alquran dan menggunakannya sebagai instrumen politik adalah orang-orang khusus. Dalam situasi seperti ini, penyebaran wacana keberagamaan rentan dimonopoli. Akibatnya narasi Islam moderat—yang di negara mayoritas Sunni seperti Arab Saudi dan Indonesia diglorifikasi melalui reinterpretasi ayat-ayat perang—di Iran terganjal.

Kendati begitu, terlepas dari adanya sentimen Post-Islamisme kalangan muda—mengetahui Iran telah sejak lama bersitegang dengan Israel—kondisi di atas adalah yang paling masuk akal bagi Iran. Sederhana, bagaimana Iran bisa tetap mempertahankan kedaulatannya sebagai suatu negara bila untuk membalas serangan ke Israel saja, ia harus mempertimbangkan pentingnya moderasi beragama.

Artinya, di luar pembalasan dendam dan pertimbangan keunggulan militer Iran di bidang serangan jarak jauh, ada aspek lain yang menjadikan Iran berani membalas serangan Israel dan akan tetap melakukannya, yaitu karena Iran semacam imun terhadap narasi Islam moderat. Dari kacamata ini, rasanya sulit untuk berharap agar Arab Saudi turut masuk ke gelanggang dan dalam konteks Palestina, moderasi Islam bukan tidak relevan melainkan omong kosong. ☐f

*) **Muhammad Saifullah**, dosen Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) An Nur Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kaukus Parlemen Stop Darurat Sampah

Ashari Cahyo Edi

lusinya (Bacchi, 2009).

Platform pembelajaran kebijakan, dengan demikian, menguatkan semangat politik *positive-sum game* (menang bersama) dan menekan syahwat *zero-sum game* (agar satu pihak menang, pihak lainnya harus kalah).

Kedua, nalar pembelajaran penting untuk menyemai, mensosialisasikan, dan mengonsolidasikan gagasan kebijakan baru. Selama ini, pembuat kebijakan umumnya memahami masalah sampah dan urgensi penyelesaiannya, tetapi tak berani beraksi lebih jauh.

Lensanya serba defisit: terserap meratapi keterbatasan regulasi, anggaran, akses teknologi, dan sebagainya. Karenanya, nalar pembelajaran bisa memfasilitasi tumbuhnya perspektif yang lebih optimis, dengan fokus pada aset potensi dan kapasitas (Green & Haines, 2007).

Kaukus Parlemen

Pembentukan kaukus parlemen “Stop Darurat Sampah” layak dipertimbangkan sebagai motor utama pembelajaran, berkolaborasi dengan gugus tugas di eksekutif dan masyarakat yang secara simultan juga dibentuk. Anggota kaukus DPRD, terdiri dari legislator lintas partai yang berkomitmen menyelesaikan masalah sampah, akan bekerja sama untuk mencapai konsensus internal.

Gugus tugas dari eksekutif dan masyarakat berisi para *policy entrepreneurs* (Kingdon, 1984/2011), orang-orang yang selama ini merintis praktik dan mengkaji masalah-solusi persampahan dari komunitas, birokrasi, akademisi, perusahaan, LSM, dan organisasi masyarakat.

Kaukus parlemen sebagai jangka politik koalisi di legislatif amat strategis karena DPRD memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, hingga hak interpelasi dan menyatakan pendapat, yang dapat mendorong perubahan kebijakan serta memastikan implemen-

tasi yang efektif.

Dengan pembelajaran sebagai metode perubahan, koalisi besar dengan kaukus sebagai poros politik akan memiliki kapasitas lebih besar untuk merumuskan dan mengubah kebijakan. Proses dimulai dengan mengubah cara pandang kebijakan sampah (*policy image*) dari *status quo* (perubahan itu mustahil) ke yang lebih optimis dan transformatif.

Merujuk pada dalil gagasan (*ideational*), mati surinya politik dan kebijakan (*policy stasis*) yang berpihak pada reformasi pengelolaan sampah sebenarnya dipertahankan oleh pengawetan wacana bahwa sekat sektoral, ego kepentingan, ketiadaan teknologi, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah menghalangi inovasi (Hope & Raudla, 2012).

Dengan demikian, ketika cara pandang transformatif tersebut dapat diterima secara kolektif oleh pembuat kebijakan dan masyarakat di berbagai arena pembuatan kebijakan (*policy venues*) baik formal maupun informal (Baumgartner & Jones, 2009), maka solusi drastis dan perubahan sistemik dalam tata kelola sampah dapat terwujud. ☐f

*) **Ashari Cahyo Edi, SIP, MPA, MA, Dosen Politik & Pemerintahan, FISIPOL UGM, Studi S3 Ilmu Politik, di State University of New York, Albany.**

Pojok KR

PSIM kembali ke jalur kemenangan
-- Selamat! Raih kemenangan demi kemenangan

Haedar Nashir masuk 500 Muslim berpengaruh dunia 2025
-- Selamat! Pengakuan dunia karena kiprahnya

Kota Magelang terima penghargaan BPJS
-- Selamat! Terus berikan jaminan buat warganya

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhamad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.